

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organization for Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement (OISCA) merupakan suatu organisasi Internasional nirlaba yang berpusat di Jepang. Sebagai LSM internasional OISCA yang berdiri pada tahun 1961 di Jepang, OISCA juga mendirikan cabang di berbagai negara sebagai *house country* dari LSM internasional ini. Negara yang menjadi *house country* dari OISCA diantaranya, negara yang sedang berkembang seperti Brazil, India, Bangladesh, dan Indonesia. Sama seperti *Multinational Corporations* (MNC) tujuan OISCA sebagai LSM internasional dengan mendirikan cabang di negara – negara *house country* untuk mempermudah kinerja LSM dalam melakukan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat *grassroot* yang ada di negara – negara berkembang. Orientasi dari LSM internasional OISCA sama seperti LSM atau NGOs pada umumnya yaitu isu – isu non–tradisional seperti lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia. OISCA ikut berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat pedesaan, dengan menekankan pada pemberdayaan industri dasar dan pertanian juga sektor pendukung lainnya, sehingga pembangunan tersebut bisa berkelanjutan dan dapat mencapai sasaran (OISCA, 2016).

Sebagai LSM internasional, OISCA beberapa kali mendapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas kontribusinya dalam program – program yang

diadakan. Diantaranya, pertama pada tahun 1989 OISCA mendapatkan "*Special Testimonial for Distinguished Services for Youth*" dari *Secretary-General of the United Nations*, kedua pada tahun 1992 OISCA mendapat penghargaan "*UN Earth Summit Award for Sustainable Development*" dan pada tahun 1995 OISCA mendapatkan "*Category I (General) Consultative Status of the UN Economic and Social Council*" (OISCA, 2016). Sejumlah penghargaan yang didapatkan OISCA merupakan suatu pembuktian OISCA dalam berkontribusi untuk mewujudkan pembangunan di tingkat internasional. Penghargaan dari PBB terhadap OISCA tidak lepas dari segala programnya yang telah berjalan di beberapa negara sedang berkembang di kawasan Amerika Selatan, dan Asia , seperti Bangladesh, India, Myanmar, Malaysia, Timor–Leste, dan juga Indonesia.

Sebagai *Non-Government Organizations* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), OISCA mengandalkan pendanaan dengan mencari donatur – donatur untuk setiap kegiatan atau program yang diadakan. Individu, Organisasi Internasional, MNC hingga pemerintah Jepang pun menjadi mitra OISCA dalam mendukung setiap programnya. Pemerintah Jepang selaku *home country* pada tahun 2015 mengadakan kerjasama dengan LSM internasional OISCA dalam pemberian bantuan luar negeri ke Indonesia. Hal ini merupakan suatu cara berbeda yang dilakukan negara sebesar Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia.

Saat ini Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar dunia. Hal ini terbukti pada data Bank Dunia, Jepang tercatat sebagai negara yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 4,5 triliun Dollar AS

atau negara dengan PDB tertinggi ketiga di dunia hingga tahun 2016 (World Bank, 2016). Berdasarkan pada data World Bank tersebut, dapat dikatakan bahwa Jepang merupakan kategori negara 'maju'. Menurut pandangan kaum liberalis, dalam tatanan dunia internasional sebagai negara maju Jepang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan luar negeri dan mewujudkan pembangunan di negara sedang berkembang (NSB). Hal tersebut dibenarkan oleh Robert Gilpin yang mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau layak kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin (Gilpin, 1987).

Keberhasilan Jepang dalam memajukan ekonominya hingga saat ini, tidak membuat Jepang mengurangi keaktifannya sebagai negara pendonor untuk melakukan bantuan luar negeri dalam dunia internasional, khususnya di negara sedang berkembang (NSB). Terbukti menurut data yang dilansir *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Jepang berada pada posisi keempat sebagai negara pendonor terbesar di dunia dan merupakan negara pendonor terbesar di kawasan Asia dengan total bantuan luar negeri Jepang hingga 2016 mencapai 165 juta Dollar AS, di bawah Jerman dengan total bantuan 284 juta Dollar AS, Uni Eropa dengan total bantuan 343 juta Dollar AS dan Amerika Serikat di posisi pertama dengan 1.494 juta Dollar AS (UNHCR, 2016).

Pencapaian prestasi Jepang dalam bantuan luar negeri menurut UNHCR tersebut tidak lepas dari keberhasilan skema bantuan luar negeri andalan Jepang yaitu *Official Development Assistance* (ODA). *Official Development Assistance* (ODA) merupakan suatu program bantuan ekonomi dari pemerintah Jepang yang berawal dari

ganti rugi perang Jepang dan kemudian dilanjutkan menjadi program bantuan luar negeri pemerintah Jepang di bidang ekonomi. *Official Development Assistance* (ODA) juga memiliki dua jenis program bantuan yaitu bilateral dan multilateral (Kedutaan Besar Jepang, 2016). Bantuan bilateral ODA terdiri dari dua jenis bantuan, yaitu hibah bilateral (bantuan hibah dan kerjasama teknis) dan pinjaman (pinjaman dalam bentuk Yen). Sedangkan bantuan multilateral ODA terdiri dari kontribusi untuk lembaga-lembaga PBB dan kontribusi pada lembaga – lembaga pembangunan multilateral, yang disalurkan melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.

Jepang mulai menjadi negara pemberi bantuan (*donor country*) sejak tahun 1954. Hal ini berarti hanya berselang lebih kurang sembilan tahun setelah kehancuran Jepang pada Perang Dunia II, sebuah transformasi dari sekedar negara penerima bantuan hingga menjadi negara pendonor besar di dunia. Jepang pertama kali menjadi negara donor ketika negara ini terlibat dalam *Colombo Plan* dan menyumbang lebih dari 221 Milyar Dollar AS (sekitar 31.7 trilyun yen) dari skema *Official Development Assistance*(ODA) kepada 185 negara (Ryantori, 2014). *Colombo Plan* memiliki tujuan awal untuk membangun dan memberi bantuan untuk pembangunan di kawasan Asia Tenggara yang saat itu banyak menjadi korban perang. Sebuah waktu yang sangat singkat untuk sebuah negara melakukan transformasi dari negara yang menerima bantuan menjadi negara pendonor, disaat negara lain di kawasan Asia sedang berada pada posisi transformasi dari kehancuran pasca perang.

Sasaran penerima bantuan luar negeri Jepang melalui program *Official Development Assistance* (ODA) di prioritaskan bagi negara – negara yang berada di

kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang mayoritas negara - negaranya merupakan negara sedang berkembang (NSB), selain itu adanya Indonesia sebagai negara yang pernah menjadi korban perang oleh Jepang dan juga sesuai intruksi *Heart to Heart* yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Fukuda kepada ASEAN pada tahun 1977 atau yang dikenal dengan Doktrin Fukuda (Subagyo, 2005). Adapun isi dari Doktrin Fukuda, **Pertama**, Jepang menolak segala bentuk peran militer. **Kedua**, Jepang akan melakukan hubungan saling percaya dan pendekatan dari hati-ke-hati (*heart-to-heart understanding*). **Ketiga**, Jepang akan bekerjasama dengan ASEAN menyelesaikan permasalahan di Indo-China dan memperkuat solidaritas regional (Hitoshi, 2009).

Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang sering mendapatkan bantuan luar negeri dari Jepang ialah Indonesia. Bukan hanya karena status Indonesia sebagai negara yang pernah menjadi korban perang pemerintah Jepang, akan tetapi juga Indonesia sebagai negara sedang berkembang (NSB) yang menurut Jepang memiliki ‘potensi besar’ di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, bantuan luar negeri Jepang untuk Indonesia mengalami beberapa fase perubahan. *Pertama*, bantuan yang diberikan Jepang untuk Indonesia berupa ganti rugi perang yang dilakukan Jepang selama Perang Dunia ke-2 (UNTS, 1952). *Kedua*, sebagai tahap akhir reparasi perang, dimana Jepang lebih menekankan pada motif ekonomi dalam bantuan luar negerinya. Hal ini terlihat dari bentuk bantuan-bantuan yang ada bersifat mengikat, sebagai contohnya dalam membangun infrastruktur seperti jalan, dan jembatan. Dalam proses pembangunan tersebut bahan baku yang digunakan,

perusahaan yang akan membanggunya, serta teknisinya pada umumnya berasal dari Jepang yang tentunya bertujuan untuk mempromosikan ekspor Jepang (Koppel B. M., 1993). Dapat dengan mudahnya masuk dan diterimanya produk otomotif dan elektronik Jepang di Indonesia pada saat itu menandakan keberhasilan salah satu bantuan luar negeri Jepang di Indonesia berupa transfer teknologi dan investasi. *Ketiga*, terjadi sejak tahun 1989 hingga saat ini, dalam fase ini posisi Jepang telah berhasil menjadi negara pendonor terbesar untuk Indonesia dan juga Indonesia sebagai negara penerima terbesar bagi Jepang (Antaraneews, 2006).

Keberhasilan bantuan luar negeri Jepang untuk Indonesia tidak hanya pada investasi *high technology* saja, melainkan bantuan hibah untuk pembangunan di Indonesia. Sasaran bantuan hibah Jepang untuk Indonesia ialah pembangunan di tingkat masyarakat *grassroot* dan untuk mencapainya, Pemerintah Jepang membutuhkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) negaranya yang memiliki relasi dengan Indonesia untuk mendukung tersalurkannya bantuan luar negeri Jepang secara langsung ke masyarakat *grassroot*. Menurut Phillip Eldridge dalam bukunya yang berjudul “*Non-Government Organization and Democratic in Indonesia*”, memungkinkannya LSM memiliki hubungan yang sangat partisipatif, mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dibanding dengan kegiatan yang bersifat advokasi, kurang memiliki minat pada hal yang bersifat politis, tapi mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan selalu memelihara dukungan pada tingkat *grassroots* (Eldridge, 1995).

OISCA Internasional mulai mengadakan kerjasama dengan pemerintah

Indonesia yaitu dengan ditandatanganinya suatu perjanjian pada tanggal 5 Januari 1979 persetujuan ini beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali terbentuk Memorandum of Understanding (MOU) dengan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 19 Juni 1985 (KEMENLU, 2011). Kontribusi OISCA untuk pembangunan pada tingkat masyarakat *grassroot* di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai pendanaan mandiri untuk melakukan program – program, bekerjasama dengan perusahaan asing (Jepang) yang berada di Indonesia sebagai sumber dana program pembangunan sosial, hingga cara yang berbeda dari LSM – LSM lain di Indonesia yaitu bekerjasama dengan pemerintah Jepang sebagai '*home country*' untuk mendukung bantuan luar negeri Jepang di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana peran *Organization for Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement* (OISCA) sebagai mitra pemerintah Jepang dalam mendukung bantuan luar negeri ke Indonesia ?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa bagaimana peran OISCA dalam mendukung bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia diperlukan konsep guna mengkajinya. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep sebagai alat untuk memahami fenomena yang sedang menjadi objek analisis yaitu, konsep bantuan luar negeri dan pandangan pluralisme

terhadap Politik Luar Negeri.

1. Konsep Bantuan Luar Negeri

Ilmu hubungan internasional konsep bantuan luar negeri memiliki beberapa perspektif untuk mendefinisikannya, dalam masalah ini penulis menggunakan konsep bantuan luar negeri menurut Stefan Cibian dalam bukunya yang berjudul *Foreign Aid in Disarray: Theoretical Gaps and Policy Failures* (Cibian, 2008). Stefan Cibian membandingkan dua perspektif utama dalam kajian ilmu hubungan internasional, yaitu realis dan liberalis pada bantuan luar negeri suatu negara.

Dalam perspektif realis, sistem internasional yang anarki menciptakan kebebasan otonomis diantara negara-negara. Hal tersebut membentuk sebuah sistem internasional yang terdesentralisasi dimana setiap negara mempunyai kedaulatan dan 'power' sendiri. Dalam konteks ini, bantuan luar negeri praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional.

Masalah utama bagi realis dalam menjelaskan praktek bantuan luar negeri adalah mereka menyangkal tujuan bantuan luar negeri adalah untuk "menolong pembangunan sebuah negara". Realisme menentang bahwa bantuan luar negeri bertujuan untuk pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. 'Bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi' dalam pandangan realis hanyalah *label* pada kebijakan negara dalam mengejar power dan supremasi. Efektivitas bantuan luar negeri bagi realisme di evaluasi berdasarkan seberapa loyal negara-negara resipien kepada donor mereka.

Perspektif pemikiran hubungan internasional selanjutnya yang memberikan

perhatian cukup besar terhadap bantuan luar negeri adalah liberalisme. Kaum liberal secara tajam menentang pemikiran realis. Jika realis sama sekali tidak menerima ide ‘melakukan pembangunan’ dalam konteks bantuan luar negeri, liberalis tetap mempertahankan visi moral, nilai dan ide yang menyusun dasar bagi penyaluran donor di negara dunia ketiga. Posisi pandangan liberal tentang bantuan luar negeri bukan hanya menawarkan peran dan nilai yang lebih penting, tapi mengambil langkah yang lebih jauh dengan menciptakan harapan akan suksesnya proses pembangunan dengan bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri Jepang di Indonesia dalam tulisan ini sesuai dengan perspektif liberisme yang menyatakan perlunya pembangunan dalam bantuan luar negeri untuk negara – negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia.

2. Pandangan Pluralisme dalam Politik Luar Negeri

Jepang merupakan negara maju yang melakukan politik luar negeri berupa bantuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang melibatkan aktor *non – state* dalam pelaksanaannya. Robert Keohane mengatakan bahwa, “*Institutional both formal (International Organization) and less formal (Regimes) can promote cooperations*”. Sehingga dari pernyataan Keohane tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk institusi atau kerjasama, yaitu yang pertama hubungan formal antar negara dengan negara atau dengan organisasi non negara dan yang kedua yaitu rezim internasional (Keohane, *International Institutions And State Power: Essays in International Relations Theory*, 1989). Tindakan politik luar negeri yang dilakukan

Jepang sesuai dengan pandangan pluralis, yang mana kaum pluralis melihat hubungan internasional dibagi ke dalam 4 kunci asumsi, yaitu :

1. Aktor non-negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.

2. Negara bukan aktor tunggal

Negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu - individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Negara bangsa bukanlah entitas yang terintegrasi, karena negara dan aktor non negara sering terlibat bersama dalam memformulasi aktifitas hubungan internasional.

3. Negara bukan aktor rasional.

Penganut pluralis menantang realitas bahwa negara bukanlah aktor rasional. Kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda. Proses pengambilan kebijakan luar negeri bukanlah proses rasional melainkan proses sosial. Proses pengambilan kebijakan luar negeri merupakan koalisi dan kontra koalisi yang menyebabkan dapat mengurangnya optimalisasi tujuan yang ingin dicapai.

4. Agenda Politik Internasional sangat luas.

Penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan dalam hubungan internasional. Hubungan internasional memiliki agenda yang sangat luas dan bervariasi. Sejak tiga puluh tahun terakhir isu-isu ekonomi dan sosial bahkan mengambil posisi terdepan dalam perdebatan internasional.

D. Hipotesa

1. OISCA dilibatkan dalam proses bantuan luar negeri Jepang oleh pemerintah Jepang sebagai penyalur dan pelaksana dalam pembangunan pada tingkat masyarakat *grassroot* di Indonesia.

2. OISCA dilibatkan sebagai mitra dalam bantuan luar negeri Jepang di Indonesia yang menunjukkan bahwa bantuan luar negeri mengalami perkembangan dari stigma bahwa negara merupakan aktor tunggal (*state-centris*) menjadi adanya peran aktor *non-state* dalam politik luar negeri yang lebih pluralis.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder (*library research*) dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode Induktif yaitu, mengelaborasi fakta - fakta yang terjadi dengan teori atau konsep yang mendukung fakta tersebut, Sedangkan dari segi pendekatan, penelitian ini bersifat induktif kualitatif.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul “Peran *Organization for Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement* (OISCA) dalam Mendukung Pemberian Bantuan Luar Negeri Jepang ke Indonesia” bertujuan untuk mengetahui bahwa pada proses pemberian bantuan luar negeri, negara bukanlah aktor tunggal untuk melakukannya. Peran aktor *non-state* seperti *International Non – Government Organization* (INGO) memungkinkan sebagai mitra untuk mewujudkan politik luar negeri suatu negara seperti halnya OISCA yang mendukung bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia.

G. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai peran OISCA dalam mendukung bantuan luar negeri Jepang di Indonesia maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah peran OISCA sebagai aktor *non-state* yang mendukung bantuan luar negeri Jepang dan program bantuan luar negeri oleh Jepang yang ditujukan kepada Indonesia. Bantuan luar negeri yang dilakukan Jepang ke Indonesia pada tahun 2015.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai perkembangan Jepang dengan Official Development Assistance (ODA) pasca Perang Dunia ke II dan perkembangan adanya sarana LSM dalam program bantuan Jepang

BAB III: Membahas mengenai peran OISCA menjadi mitra Jepang dalam mendukung bantuan luar negeri ke negara sedang berkembang (NSB) atau Indonesia dan bagaimana cara LSM internasional OISCA membantu pemerintah Jepang dalam bantuan di Indonesia.

BAB IV : Membahas cara yang dilakukan pemerintah Jepang sebagai negara pendonor atau pelaksana dalam mewujudkan bantuan luar negeri di Indonesia dengan melibatkan LSM OISCA sebagai mitra pemerintah Jepang.

BAB V: Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I – BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan terperinci. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.